

OPINI



Buruh Tunggu Respons Pemerintah

Aksi demo buruh tidak berpengaruh pada perdagangan di lantai bursa saham. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) memang terkoreksi, tetapi tipis saja dan lebih dipicu anjloknya sejumlah harga komoditas di pasar global.

Pada awal perdagangan, indeks langsung menguat 0,12% atau 4,946 poin pada level 4.261,785. Namun, kenaikan indeks tersebut tidak berlanjut, bahkan terkoreksi sekitar 0,13% atau 5,328 poin pada posisi 4.251,511. Adapun nilai tukar rupiah terhadap USD juga melemah tipis. Pada penutupan perdagangan kemarin tercatat Rp9.595 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sehari sebelumnya pada level Rp9.590 per USD.

Semula para pelaku bisnis, terutama mereka yang berkiprah di pasar modal, diliputi kekhawatiran akan dampak aksi demo buruh. Pasalnya, sehari sebelumnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) telah menyampaikan bahwa tak kurang dari 3 juta buruh se-Indonesia siap menggelar aksi mogok massal.

Aksi demo buruh yang berlangsung di Jabodetabek memang tidak diwarnai aksi yang tidak diinginkan. Pesan yang disampaikan menyangkut soal penghapusan praktik *outsourcing*, pemenuhan upah yang layak, dan penyediaan jaminan kesehatan tinggal menunggu respons pemerintah. Apabila tuntutan tersebut tidak dipedulikan pemerintah, para buruh mengancam akan menduduki sejumlah objek vital.

Masalahnya, apakah pemerintah akan menunjukkan keberpihakan kepada buruh? Kalau tuntutan yang sudah disampaikan tidak diperhatikan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal akan membuktikan ancamannya "menguasai" objek vital sehingga aktivitas perekonomian terganggu. Kalau aspirasi buruh tidak didengar, sebanyak 10 juta buruh akan dikordinasi untuk mogok nasional dengan menduduki 12 pintu tol, 4 bandara internasional, dan menutup sejumlah pelabuhan. "Aksi hari ini merupakan *early warning*. Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi bila tuntutan tidak direspons," tegasnya.

Menyikapi tuntutan buruh tersebut, pemerintah justru balik bertanya apa lagi yang harus dilakukan? Pemerintah mengklaim bahwa tuntutan buruh tersebut setidaknya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) No 13 Tahun tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan minimum. Sementara urusan *outsourcing* (alih daya), Menakertrans bersama wakil pengusaha, buruh, dan lembaga kerja sama Tripartit Nasional sudah menyepakati hanya lima pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan, keamanan, katering, transportasi, dan jasa pertambangan migas.

Menurut pemerintah, kelima pekerjaan alih daya itu tinggal dibuatkan aturan main yang tegas. Sebab praktik alih daya selama ini diakui oleh pemerintah maupun kalangan pengusaha banyak terjadi multitafsir di lapangan yang merugikan para buruh. Kita berharap penyelewengan yang dilakukan pengusaha yang nakal itu harus ditindak tegas. Di sisi lain, menghapus praktik *outsourcing* jelas akan membebaskan kalangan pengusaha, sebab tidak semua pekerja yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan harus dijadikan karyawan tetap, misalnya petugas jasa kebersihan.

Kita berharap semua pihak harus menggunakan akal sehat menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai wasit harus bertindak adil dan tegas, pengusaha sebagai pemberi upah juga harus menyejahterakan para buruh sebagai ujung tombak perusahaan. Kalangan buruh pun sudah saatnya mengurangi frekuensi turun ke jalan untuk sekadar menyuarakan aspirasinya, apalagi mengancam menduduki objek vital. ●

Korupsi, Kapitalisme dan Demokrasi



AMICH ALHUMAMI
Antropolog; Bekerja di Bappenas

Sidang pembaca yang budiman, jangan terpancing membaca ungkapan ini: *corruption is bastard sister of capitalism and democracy!* Kalimat satirikal ini melukiskan kapitalisme, demokrasi, dan korupsi secara pejoratif dan paradoksal. Kapitalisme acap kali dicela bahkan dikutip karena berwatak eksploitatif dan dominan, namun pesona ideologi ini mampu memikat banyak negara-bangsa di dunia. Mereka menjadikan kapitalisme sebagai basis ideologi untuk memandu dalam mengelola perekonomian negara.

Saksinya, kapitalisme sukses menaklukkan seteru ideologisnya—sosialisme—dan kemudian memaksanya untuk berkiprah di wilayah yang amat terbatas di pojok sejarah dunia. Kini kapitalisme menjadi pemain dominan dalam derap globalisasi, yang menembus batas negara-bangsa dan mengukuhkan diri sebagai ideologi ekonomi hegemonik. Kapitalisme yang telah menjelma menjadi ideologi bergenre baru—neoliberalisme—berhasil menyerap hampir seluruh kekuatan dunia ke dalam suatu aransemen tunggal: ekonomi pasar global.

Seperti kapitalisme bagi bangsa-bangsa di dunia, korupsi bagi bangsa Indonesia juga dihujat dan dikutuk tanpa henti, tapi ia justru kian mengurita yang merambah seluruh lini kehidupan politik nasional. Secara politik, korupsi telah menjadi epidemi karena ia mengakar kuat di dalam struktur kekuasaan negara dan birokrasi pemerintahan. Secara sosial, korupsi sudah menjadi patologi akut karena ia telah berkembang menjadi gejala umum yang lazim dijumpai di dalam masyarakat. Secara kultural, korupsi telah membudaya karena ia berkembang menjadi nilai yang dianut oleh

dan mengalami internalisasi bukan saja di lapisan elite politik, tetapi juga di kalangan warga masyarakat.

Korupsi menggerakkan denyut nadi kehidupan masyarakat dan menjadi perilaku sosial keseharian. Meskipun publik tanpa kenal lelah menyuarkan kecaman dan kutukan atas praktik korupsi, namun perilaku korup justru kian tak terkendali tanpa ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikannya. Banalitas korupsi sungguh di luar nalar publik untuk dapat mencernanya, terutama ketika korupsi justru kian subur di dalam sistem politik demokrasi.



Sebagai bangsa, kita memilih sistem demokrasi dengan alasan untuk melepaskan belenggu penguasa korup dalam sistem pemerintahan otoriter Orde Baru. Sungguh, hal yang paling dibenci masyarakat dari rezim Orde Baru adalah praktik korupsi yang menggerogoti sendi-sendii kekuasaan negara, selain watak represif yang mengengkang kebebasan politik dan memasung hak-hak sipil rakyat. Rezim otoritarian yang melekat pada penguasa Orde Baru dikemukakan karena didakwa sebagai biang keladi korupsi yang mengakar di pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintahan.

Maka, publik pun menyambut dengan gegap gempita sis-

tem demokrasi untuk mengurus administrasi pemerintahan modern yang bebas korupsi. Janji-janji ideal yang ditawarkan oleh sistem demokrasi adalah praktik politik makin bebas, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kian terbuka, yang ditopang oleh kebebasan pers dalam menyuarakan aspirasi. Dengan demikian, publik punya peluang untuk melakukan kontrol baik melalui saluran lembaga politik di parlemen maupun melalui gerakan ekstraparlemen dalam bentuk aksi protes sosial dan demonstrasi massal.

Namun, pemerintahan demokratis justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan janji-janji ideal dalam sistem demokrasi. Sama seperti pemerintahan otoriter rezim Orde Baru, pemerintahan demokratis di era Orde Reformasi pun melahirkan elite-elite penguasa korup dalam skala yang jauh lebih masif. Sistem politik demokrasi tak menjamin dapat menciptakan pemerintahan bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Maka, simaklah kritik kaum neo-Marxis terhadap gejala paradoksal korupsi-kapitalisme-demokrasi. Korupsi yang selalu melibatkan elite-elite politik dan pemangku kekuasaan bersifat alamiah karena mereka sejatinya merupakan agen kepentingan kaum kapitalis global-nasional-lokal.

Perilaku elite-elite politik korup menyerupai predator yang siap melumat mangsa yang lemah demi kelangsungan hidup mereka sendiri dan sama sekali mengabaikan kepentingan umum. Mereka tak menghiraukan tuntutan publik untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat. Mereka terlibat korupsi karena menjadi bagian

dari pertarungan di antara elite-elite oligarkis yang membajak lembaga-lembaga politik demokrasi untuk kepentingan melanggengkan sistem ekonomi kapitalis.

Mereka mengusung isu demokrasi sebagai dagangan politik untuk menjadi jembatan bagi para komprador ekonomi kapitalis global-nasional-lokal agar mereka dapat mengoperasikan kegiatan bisnis dan perburuan rente (lihat Robison & Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, Routledge 2004).

Di Indonesia, gejala paradoksal korupsi-kapitalisme-demokrasi menemukan bentuk nyata ketika terjadi liberalisasi politik, yang kemudian menyuburkan praktik *money politics*. Praktik *money politics* dalam konteks liberalisasi politik telah mengubah demokrasi sebagai sistem kendali kekuasaan menjadi demokrasi uang, yang menjadikan kekuasaan sebagai medium akumulasi kapital.

Demokrasi uang ditandai oleh dominasi para pemilik modal dalam percaruan politik nasional terutama dalam peristiwa pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Saksinya, betapa keyakinan lama bahwa demokrasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan telah runtuh. Impian untuk dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dalam sistem demokrasi laksana fatamorgana. Ongkos politik dan biaya demokrasi di Indonesia demikian mahal seperti tercermin pada politik transaksional dan politik uang yang menjadi akar-tunjang praktik korupsi masif-gigantik di kalangan politisi dan pemangku kekuasaan. Demokrasi macam inilah yang selalu kita banggakan di pentas dunia? ●

”
Praktik money politics dalam konteks liberalisasi politik telah mengubah demokrasi sebagai sistem kendali kekuasaan menjadi demokrasi uang, yang menjadikan kekuasaan sebagai medium akumulasi kapital.

Fenomena Jokowi 2012 = Fenomena Obama 2008?



VISHNU JUWONO
Mahasiswa Program Doktor pada London School of Economics (LSE), Inggris, dan Dosen FISIP Universitas Indonesia; email vjuwono@ui.ac.id

Rencananya pada 7 Oktober nanti pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pasangan ini mengalahkan petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan purnawirawan tentara, Nachrowi Ramli.

Melihat antusiasme dari para pendukung pasangan Jokowi-Ahok pada satu bulan terakhir ini, penulis menjadi teringat empat tahun lalu, saat rakyat AS begitu antusias mendukung senator muda asal negara bagian Illinois bernama Barack Hussein Obama yang berhadapan dengan Senator senior asal Arizona, John McCain, dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008. Seperti yang kita ketahui, pada akhirnya Obama, yang berpasangan dengan Joe Biden, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden setelah memperoleh suara 365 dan mengalahkan John McCain yang berpasangan dengan Sarah Palin dengan raih suara sebesar 173.

Antusiasme Para Pendukung Muda
Pada musim panas hingga pemilihan Presiden AS pada bulan November 2008, begitu banyak pemuda yang umumnya masih mahasiswa menjadi relawan dari kampanye Presiden

Obama. Tidak berlebihan jika kampanye terbuka Obama dibanjiri para penontun yang sering mencapai jumlah 50.000, bahkan di Missouri dan Denver lebih dari 100.000 penontun menyaksikan kampanye terbuka Barack Obama.

Terbukti, menurut studi yang dilakukan oleh *Pew Research Center for the People and the Press* pada November 2008, Barack Obama memperoleh suara dari pemilih usia 18–29 tahun sebesar 66% dibandingkan John Mc Cain yang hanya sebanyak 31%.

Selain itu kreativitas dari para pendukung Senator Obama juga menambah energi dari kampanyenya. Kita tentu masih ingat bagaimana poster kampanye Obama bertema *Hope* (harapan) yang dibuat oleh Shepard Fairey seorang artis desainer grafis terkemuka di AS, menjadi begitu populer dan digunakan untuk pembuatan kaos, gantungan kunci, magnet lemari es, dan berbagai atribut kampanye Obama lain.

Pada kampanye Jokowi-Ahok beberapa bulan lalu kita melihat Jokowi dengan cerdik memopulerkan kemeja kotak-kotaknya menjadi semacam kostum resmi kampanye mereka. Penampilan Jokowi yang sering memadukan kemeja kotak-kotak tersebut dengan celana jins, tentu dengan mudah membangun kedekatan emosional dengan para pemilih dari kalangan pemuda.

Keberhasilannya membangkitkan antusiasme di kalangan muda membuat kampanye Jokowi-Ahok berhasil menghimpun 15.059 relawan. Tidak mengherankan jika dengan dibantu para relawan kampanye-kampanye terbuka

Jokowi-Ahok dipenuhi oleh ribuan warga Jakarta yang tidak sedikit berasal dari kalangan muda. Terakhir adalah aksi *flash mob* yang dihadiri 2.000 pendukung serta Jokowi sendiri pada pagi hari 16 September di bundaran HI.

Teknologi Informasi
Salah satu kesuksesan dari Senator Obama pada kampanye Presiden 2008 adalah pemanfaatan internet dan media sosial dalam kegiatan kampanye baik dalam memobilisasi para pendukung, menggalang dana, dan berkomunikasi dengan para pendukungnya. Dengan merekrut salah satu pendiri *Facebook*, Chris Hughes, tim kampanye Barack Obama berhasil membangun sistem komunikasi digital berbasis internet yang efektif. Tidak kurang dari 5 juta alamat *e-mail* ditambah 3,2 juta yang terdaftar sebagai anggota pendukung akun *Facebook* kampanye Obama pada waktu itu merupakan *database* yang berharga dalam kampanye presiden bagi Barack Obama.

Tidak ketinggalan situs video *Youtube* juga digunakan untuk menyampaikan berbagai pidato Obama atau berbagai pesan kampanye baik dalam bentuk video promosi maupun video musik ataupun untuk mengklarifikasi isu-isu besar lainnya. Sebagai contoh, untuk menangkis isu sensitif terkait ras/suku, Senator Obama memberikan salah satu pidato terbaiknya pada bulan Maret 2008 yang berjudul “*A More Perfect Union*” yang diaksess hampir 4 juta kali pada masa kampanye.

Kita juga dapat melihat bagaimana popularitas Jokowi di dunia maya unggul dibanding-

kan dengan lawannya Fauzi Bowo. Akun *Facebook* kampanye Jokowi-Ahok mempunyai pendukung lebih dari 89.000 dan *account Twitter* @Jokowi_do2 mempunyai *follower* lebih dari 240.000. Bandingkan dengan akun *Facebook* kampanye Foke-Nara yang mempunyai pendukung hanya lebih dari 13.000 dan *account Twitter* @bangfauzibowo dengan jumlah *follower* tidak lebih dari 37.000.

Tidak seluruhnya kesuksesan dari kampanye Jokowi 2012 dapat disamakan dengan Obama 2008, mengingat kondisi dan skala kedua kampanye politik yang sangat berbeda, yakni Jakarta dan Amerika Serikat. Misalnya tim kampanye Barack Obama pada tahun 2008 berhasil memanfaatkan platform *social media* menjadi mesin penggalangan dana kampanye yang fenomenal dari kalangan menengah bawah AS dengan berkontribusi pada hampir setengah dari total dana kampanye Obama diperkirakan mencapai sebesar USD600 juta (lebih dari Rp5,7 triliun) dana terkumpul pada 2008. Tentu saja hal ini belum dapat diterapkan di Indonesia. Mengingat AS memiliki infrastruktur teknologi informasi serta tingkat pendidikan dan pendapatan penduduknya yang lebih baik secara signifikan dibandingkan penduduk Indonesia.

Harapan Besar
Kembali pada pengalaman pemilu AS 2008, harapan masyarakat di sana begitu besar di pundak Barack Obama yang dilantik secara resmi menjadi presiden pada Januari 2009. Namun, harapan besar tersebut pada akhirnya sulit di-

penuhi mengingat skala persoalan ekonomi AS sangat besar sehingga untuk memulihkannya membutuhkan waktu. Belum lagi Partai Republik baik di Kongres dan Senat menunjukkan sikap tidak kompromi kepada Presiden Obama seperti digambarkan dalam buku Jonathan Alter, *The Promise: President Obama, Year One* (2010).

Namun, rakyat AS sudah telanjur kecewa karena mereka menganggap pemulihan ekonomi tidak kunjung tiba dan akhirnya “menghukum” Presiden Obama. Akibatnya pada pemilihan anggota Senat dan Kongres bulan November 2010 Partai Demokrat kehilangan banyak kursi dan menjadi partai minoritas di Kongres dengan selisih 60 kursi lebih sedikit dibandingkan Partai Republik.

Permasalahan utama dari Kota Jakarta seperti macetnya jalanan, masalah banjir, serta akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin merupakan akumulasi permasalahan dari kebijakan-kebijakan Pemda DKI pimpinan sebelumnya. Ditambah lagi mereka akan berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, di mana partai pendukung Jokowi-Ahok (PDIP dan Gerindra) hanya memiliki kursi minoritas.

Namun, sebagai warga yang mendambakan Jakarta baru yang lebih baik, tentu tidak ada salahnya penulis dan warga DKI lain berharap Jokowi tidak akan bernasib seperti Presiden Barack Obama pada 2010. Selamat bekerja keras dan semoga sukses membawa perubahan dengan cepat di Jakarta yang kita cintai bersama ini sesuai janji kampanye. ●



Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafril Nasution
Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airlin
Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Sururi Alfardur
Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto
Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Suputra, Hanna Farhana
Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholli, Shalahuiddin, Sujoni, Supriyadi, Syahrin Rasyid, Widandari, Wuri Haridastuti, Yami Andriansah, Zen Teguh Triwibowo
Asisten Redaktur: Abdul Harris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baldow, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andi Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Fakhrur Haqiqi, Harley Ikhsan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma'ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibuddin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendarwan, Pajjo, Pangeran Ahmad Nurdin, Puqih Hariyanto, Rachmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustafa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahruruzi, Suwardo, Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apriadawaty, Vtriandra Bernada Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tu, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha

Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendri Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Indra Susanti, Ishiduddin, Jujuk Erna, Juni Triyanto, Kholil Rokhman, Khasiandi Sacaviasstra, M Purwadi, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Nova Sang Ayu Lesthia K, Nurul Huda, Radi Saputro, Rahmat Sahid, Rarasati Syarif, Rendra Hanggara, Sri Novriani, Susi Susanti, Sofian Dwi, Suicpto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wisnoe Moerti

Manager Litbang: Wiendy Hapsari
Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad
Koordinator Fotografer: Aziz Indra
Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto
Manager Artistik: Wisnu Handoko

Direktur Keuangan/CO: Patricia Suharya
Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H. Santoso
GM Sales: Lia Marlina, Kiki Subarkah
GM Marketing & Communications: Caeclia Hamzah
GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan

Rate Iklan Edisi Nasional 2012
Halaman Dalam
Display FC: Rp94.000/mmk, **Display BW:** Rp63.000/mmk, **Display SC:** 75.000/mmk, **Baris:** Rp35.000/4brs (1brs=32 Karakter), **Informasia FC:** Rp57.000, **Informasia BW:** Rp39.000/mmk, **Business Event Kav. (3,5 Kol x 165mm):** Rp34.000.000

Rate Iklan Edisi Nasional + 6 Daerah 2012
Cover Section: Rp150.000/mmk
Halaman Dalam
Display FC: Rp120.000/mmk, **Display BW:** Rp80.000/mmk, **Display SC:** Rp93.000/mmk, **Island Ad:** Rp136.000/mmk, **Center Spread:** Rp131.000/mmk

Halaman 1 Display FC: Rp190.000, **Halaman 3,5 Display FC:** Rp126.000/mmk
Laporan Keuangan FC: Rp48.000/mmk **BW:** Rp44.000/mmk
Baris BW: Rp50.000/4baris (1baris=32 Karakter), **FC:** Rp79.000/4baris, **Kolom FC:** Rp79.000/mmk, **Kolom BW:** Rp52.000/mmk, **Advetorial FC:** Rp124.000, **BW:** Rp84.000, **SC:** Rp97.000/mmk

Layanan Langganan: (021) 3911518, **Fax:** (021) 3929758
Iklan Display: (021) 3915634, **Fax:** (021) 3927721

Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340
Telepon/Fax: (021) 3914672,

E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, cs@seputar-indonesia.com
iklan@seputar-indonesia.com, iklanbaris@seputar-indonesia.com

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi,
Percetakan: PT Media Nusantara Press
Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5,
Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu.
Alamat: Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340
Telepon (Hunting): (021) 3926955, **Fax:** (021) 3929758,
Redaksi: (021) 3926955, Fax: (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber